

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Menurut UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, “Koperasi merupakan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Berdasarkan pengertian tersebut koperasi merupakan wujud perekonomian Indonesia yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Keberadaan beberapa koperasi telah dirasakan peran dan manfaatnya oleh masyarakat, walaupun derajat intensitasnya berbeda. Hal ini sesuai dengan pendapat Krisnamukhti (2002: 3) yang menyatakan ada tiga bentuk eksistensi koperasi bagi masyarakat, yaitu: *Pertama*, koperasi dipandang sebagai lembaga yang menjalankan suatu usaha tertentu, dan kegiatan usaha tersebut diperlukan oleh masyarakat. Peran koperasi ini juga terjadi jika pelanggan memang tidak memiliki aksesibilitas pada pelayanan dari bentuk lembaga usaha lain. *Kedua*, koperasi telah menjadi alternatif bagi lembaga usaha lain. Pada kondisi ini masyarakat telah merasakan bahwa manfaat dan peran koperasi lebih baik dibandingkan dengan lembaga lain. Keterlibatan anggota (atau juga non-anggota) dengan koperasi adalah karena pertimbangan rasional yang melihat koperasi mampu memberikan pelayanan yang lebih baik ketimbang lembaga lain. *Ketiga*, koperasi menjadi organisasi yang dimiliki anggotanya. Rasa memiliki ini dinilai telah menjadi faktor utama yang menyebabkan koperasi mampu bertahan pada berbagai kondisi sulit, yaitu dengan mengandalkan loyalitas anggota dan kesediaan anggota untuk bersama koperasi

menghadapi kesulitan tersebut, karena dalam koperasi anggota merupakan pemilik dan pengguna (dual-identity).

Untuk mewujudkan ke-3 hal tersebut, dijelaskan dalam prinsip koperasi yang diperkuat oleh undang-undang perkoperasian No.17 ayat 6 tahun 2012 yang menyatakan bahwa:

“Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi.”

Definisi pendidikan secara umum menurut Undang-Undang No. 2 tahun 1989, pasal 1 ayat 1:

“Adalah usaha sadar untuk mempersiapkan peserta didik melalui kegiatan pengajaran, bimbingan dan/ atau latihan bagi perannya dimasa yang akan datang.”

Adapun beberapa kesimpulan tentang pendidikan yang dikutip dari Pasal 1 UU SISDIKNAS no. 20 tahun 2003 disebutkan bahwa Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dan berdasarkan dari bunyi pasal ini dapat diketahui bahwa pendidikan adalah sistem yang merupakan suatu totalitas struktur yang terdiri dari komponen yang saling terkait dan secara bersama menuju kepada tercapainya tujuan (Soetarno, 2003: 2).

Maka pendidikan anggota memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan koperasi. Apabila anggota koperasi tidak memiliki pengetahuan tentang berkoperasi maka koperasi tersebut akan sulit berkembang dalam persaingan ekonomi yang semakin ketat. Randahnya pendidikan dirasakan juga pada KPRI-KPKS yang berdampak menghambat tercapainya tujuan.

Pendidikan dan pelatihan perkoperasian merupakan kegiatan penuluran ilmu/pengetahuan perkoperasian serta peningkatan keterampilan teknis yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan oleh koperasi dan atau pihak-pihak di luar koperasi yang terarah kepada unsur-unsur gerakan koperasi dan masyarakat dengan tujuan agar anggota koperasi meningkat pengetahuan, pemahaman, kesadaran, keperilakuan dan keterampilannya dalam berkoperasi serta masyarakat menjadi tahu, mengerti dan termotivasi menjadi anggota koperasi secara sukarela. Pendidikan dalam hal ini menggambarkan tentang proses, frekuensi, materi, kelompok sasaran, agen-agen pelaksanaan dan tujuan yang ingin dicapai melalui penyampaian informasi.

Penyampaian informasi merupakan salah satu tujuan dari proses komunikasi yaitu untuk memberi informasi (*to inform*). Fungsi komunikasi yang dikemukakan oleh Onong Effendy, “Fungsi komunikasi *to inform* (menyampaikan informasi), *to educate* (mendidik), *to entertain* (menghibur), *to influence* (mempengaruhi)”.

Pada fungsi komunikasi *to inform* (menyampaikan informasi), ditujukan untuk menyampaikan informasi kepada khalayak atau public yang dilakukan oleh komunikator guna menjadikan khalayak atau public atau komunikan menjadi lebih tahu. Dalam proses komunikasi tersebut bertujuan untuk membentuk kesepahaman berfikir (*mutual understanding*) antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses komunikasi. Dalam proses komunikasi, komunikator mengirim pesan atau informasi kepada komunikan sebagai sasaran komunikasi. (Tommy Soeprapto, 2015: 5).

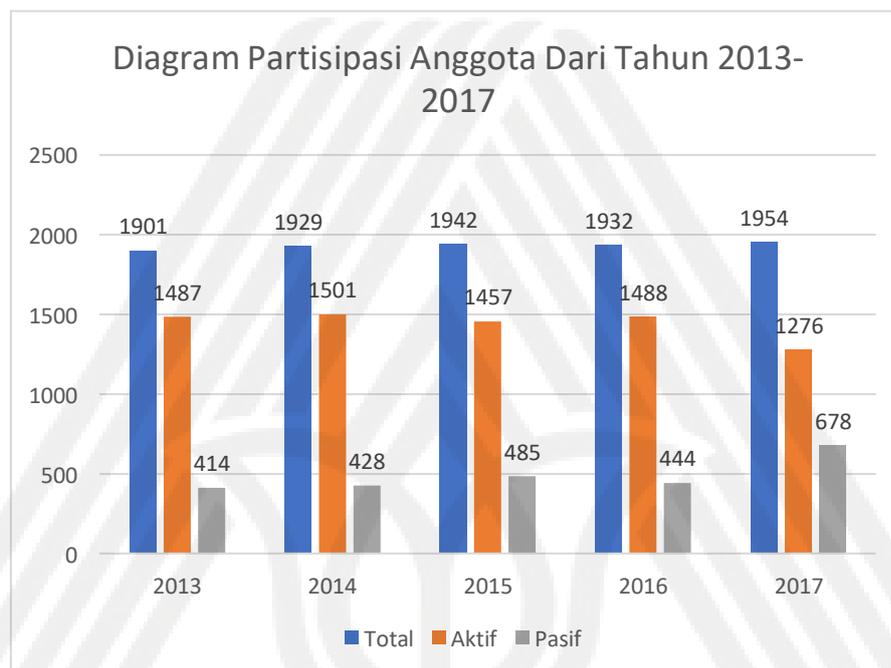
Dalam kajian sosial (sosiologi), syarat terjadinya interaksi sosial adalah dengan adanya (1) kontak sosial; (2) komunikasi. Komunikasi adalah suatu hubungan yang melibatkan proses ketika informasi dan pesan dapat tersalurkan dari satu pihak ke pihak lain. Tanpa adanya komunikasi, pendidikan anggota tidak akan membuahkan hasil yang

sesuai dengan tujuan bahkan dapat menyebabkan terjadinya kesalahan dalam proses komunikasi (*Miss Communications*). Oleh sebab itu dibutuhkan model komunikasi yang tepat dalam memberi pendidikan kepada para anggota koperasi untuk menciptakan kesepahaman berfikir serta menghindari terjadinya *miss communications*.

Model dibangun agar kita dapat mengidentifikasi, menggambarkan atau mengategorikan komponen-komponen yang relevan dari suatu proses. Sebuah model dapat dikatakan sempurna, jika model tersebut mampu memperlihatkan semua aspek-aspek yang mendukung terjadinya sebuah proses. Misalnya dapat melakukan spesifikasi dan menunjukkan kaitan antara satu komponen dengan komponen lainya dalam suatu proses, serta keberadaannya dapat ditunjukkan dengan nyata (Hafied. 1998: 39-40).

Rendahnya pengetahuan anggota KPRI-KPKS dipicu oleh faktor kurangnya pemahaman terhadap hak serta kewajiban anggota sebagaimana yang telah tertuang dalam AD-ART dan peraturan khusus. Permasalahan tersebut tertera pada buku Laporan RAT dalam 5 tahun terakhir. Oleh karena itu pendidikan perkoperasian sangat diperlukan untuk memberikan bekal yang memadai agar anggota dapat menyadari Hak serta Kewajibannya kepada koperasi sehingga anggota dapat berperan secara aktif. Mengingat begitu pentingnya pendidikan perkoperasian, KPRI-KPKS juga telah memberikan pendidikan dan pelatihan bagi calon anggota yang berbentuk diklat singkat yang dilaksanakan dalam 2 periode, dan pendidikan anggota bagi yang terpilih sebagai perwakilan dari setiap wilayah binaan dalam bentuk pendidikan perkoperasian, namun dari hasil pendidikan yang telah dilaksanakan masih belum memberikan hasil yang maksimal. Berdasarkan hasil observasi terkait prestasi yang pernah diraih KPRI-KPKS berdasarkan buku RAT dimana KPRI-KPKS termasuk 10 koperasi terbaik di kabupaten sumedang dan rutin melaksanakan pendidikan perkoperasian bagi anggota dalam setiap tahunnya, namun diindikasi masih memiliki kendala terkait penurunan partisipasi, sehingga perlu dicermati khususnya pada

model komunikasi terkait pendidikan perkoperasian bagi anggota yang diberikan kepada anggota KPRI-KPKS agar pendidikan serta pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan tepat pada sasaran dan sesuai dengan kebutuhan anggota.



Gambar 1. 1 Perkembangan Jumlah Anggota KPRI-KPKS Kab. Sumedang

Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa terjadinya kenaikan/penurunan jumlah anggota secara signifikan di KPRI-KPKS Kab. Sumedang. Pada tahun 2016 anggota berjumlah 1937 orang dan pada tahun 2017 serjumlah 1954 orang dimana terjadi peningkatan sebanyak 22 orang. Terkait tingkat partisipasi berdasarkan interaksi anggota dalam pemanfaatan jasa koperasi, pada tahun 2016 anggota aktif berjumlah 1.488 orang dan anggota pasif berjumlah 400 orang, sedangkan pada tahun 2017 anggota aktif berjumlah 1.176 dan anggota pasif berjumlah 678 orang.

Maka dari data-data diatas dapat ditarik kesimpulan meski jumlah anggota terus meningkat, namun partisipasi anggota khususnya angka anggota tidak aktif bertambah

pada tahun 2016-2017 berjumlah 234 orang anggota yang berdampak pada tidak maksimalnya Sisa Hasil Usaha (SHU) dan pendapatan koperasi.

Kurangnya pemahaman anggota terhadap Hak dan Kewajiban anggota dalam berkoperasi diindikasikan menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya partisipasi serta lemahnya kesadaran anggota untuk turut berkontribusi secara aktif dalam berkoperasi. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui seberapa besar peran model komunikasi yang digunakan untuk mengukur efektivitas penyampaian informasi melalui pendidikan yang telah dilaksanakan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang penulis kemukakan di atas, terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Masih rendahnya pengetahuan (Kognisi) anggota dalam berkoperasi pada KPRI-KPKS.
2. Sebagian besar anggota belum memahami Hak dan Kewajiban anggota sebagaimana yang telah tertuang dalam AD-ART pada KPRI-KPKS.
3. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) perkoperasian yang diberikan kepada anggota belum mendapat hasil yang maksimal.
4. Jumlah partisipasi anggota yang mengalami penurunan dari tahun 2015-2017.

Sehubungan dengan luasnya masalah dan keterbatasan waktu, penelitian ini menitik beratkan pada masalah yang diduga memiliki pengaruh penting terhadap partisipasi anggota KPRI-KPKS, yaitu pendidikan perkoperasian anggota.

Berdasarkan Batasan masalah di atas, maka dapat **diidentifikasi** permasalahan di KPRI-KPKS sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pendidikan anggota KPRI-KPKS?
2. Bagaimana model komunikasi pendidikan pada KPRI-KPRI
3. Bagaimana Upaya manajerial yang dilakukan KPRI-KPKS guna menarik animo anggota terhadap pendidikan perkoperasian bagi anggota.

1.3 Maksud dan Tujuan

Dalam pelaksanaan penelitian ini yang disusun untuk menganalisa model komunikasi pada pendidikan anggota di KPRI-KPKS. Adapun maksud dan tujuan penelitian ini, maka peneliti akan memaparkannya sebagai berikut:

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui model komunikasi yang tepat dalam perihal pendidikan perkoperasian anggota KPRI_KPKS (Kab. Sumedang) yang mana diindikasikan berkaitan dengan tingkat kedewasaan anggota dalam berkontribusi kepada koperasi serta partisipasi anggota yang berdampak pada pendapatan serta sisa hasil usaha (SHU) koperasi.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui model komunikasi yang efektif pada pendidikan perkoperasian anggota KPRI-KPKS (Kab. Sumedang).

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pendidikan perkoperasian anggota di KPRI-KPKS (Kab. Sumedang).

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi aspek pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi aspek guna laksana, yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan menjadi masukan bagi pihak-pihak tertentu terutama bagi pengembangan ilmu manajemen koperasi dalam menginformasikan data yang berkaitan dengan pendidikan anggota dalam berkoperasi dan bagi peneliti lain, yaitu diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini, dapat memberikan manfaat berupa menambah informasi dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah keilmuan perkoperasian dan manajemen komunikasi bisnis dan penyuluhan yang berhubungan dengan pendidikan anggota koperasi dalam upaya meningkatkan partisipasi anggota sebagai pedoman yang dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya.

1.4.2 Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan atau masukan dalam menetapkan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam menentukan terkait model komunikasi pada pendidikan koperasi yang harus diterapkan agar partisipasi anggota meningkat.